

BAB V

RANGKUMAN, KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian dalam bab V ini dikembangkan dalam tiga pokok pikiran yang mencakup yaitu: rangkuman hasil penelitian, kesimpulan, dan saran-saran. Sub bab rangkuman hasil penelitian mencerminkan hasil yang diperoleh melalui rangkaian proses penelitian dalam tiga tahap yakni, kajian kritis terhadap berita konflik dalam media massa, kajian kepustakaan dan komparatif antara berbagai pandangan mengenai konflik, serta kajian kepustakaan mengenai multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Selanjutnya, sub bab kesimpulan merupakan bagian yang mendeskripsikan secara ringkas butir-butir pemikiran teoritis yang ditemukan dalam studi ini. Terakhir, bab V ini ditutup dengan sub bab saran-saran yang relevan untuk pengembangan hasil penelitian di bidang-bidang terkait.

5.1 Rangkuman Hasil Penelitian

- 5.1.1 Ketiga media massa *Republika*, *Kompas* dan *Media Indonesia* - dalam mengungkap konflik Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso - memiliki karakteristik yang sama dalam hal ruang lingkup tinjauan, dan sumber berita. Media massa tersebut cenderung mengungkap konflik dalam ruang lingkup mikro yakni terkait langsung dengan warga yang bertikai. Ruang lingkup tinjauan ini berbeda dengan sorotan para pengamat (peneliti, praktisi, dan LSM), yang memasukkan tinjauan makro seperti faktor ekonomi secara

nasional, atau sejarah keberadaan kelompok dalam konteks sosial politik, dan persaingan elit di tingkat lokal dan nasional. Selain kesamaan dalam ruang lingkup tinjauan, media massa dalam menyajikan konflik cenderung menggunakan sumber berita yang sama seperti aparat kepolisian, aparat militer, pejabat daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

5.1.2 Di samping kesamaan dalam penyajian berita ketiga media massa *Republika*, *Kompas*, dan *Media Indonesia* memiliki perbedaan sudut pandang sesuai dengan ideologi dan kepentingan masing-masing media. Berikut ini rangkuman pandangan masing-masing media massa untuk setiap kasus.

5.1.2.1 Konflik Ambon (Maluku), dilihat dalam perspektif yang berbeda oleh ketiga media. *Republika* melihat kasus Ambon sebagai konflik politik dalam konteks hubungan antar agama. Menurut pandangan *Republika*, makna politik dalam kasus Ambon lebih dari persaingan antar elit lokal, yani sudah merupakan agenda yang lebih luas berupa persaingan antara kepentingan Islam dengan Kristen (nasional dan internasional). Persaingan ini, sebagaimana dilihat oleh *Republika* telah menjurus kepada penyingkiran umat Islam dalam satu wilayah kekuasaan. Meskipun warga (pada awalnya) dalam pertikaian ini adalah kelompok yang dikorbankan, tetapi kedalaman konflik telah menyebabkan warga adalah bagian dari konflik. Bagi *Republika* konflik Ambon adalah sebuah konspirasi untuk meminggirkan umat Islam.

5.1.2.2 *Kompas* menyoroti kasus Ambon dengan cara yang lebih "lunak" dan berusaha menjadi penengah bagi kelompok-kelompok yang bertikai. Dalam sorotan *Kompas* kasus kerusuhan Ambon lebih sebagai gangguan keamanan yang menimbulkan kerugian material, ekonomi, dan jiwa. Untuk menampilkan sosok yang netral *Kompas* mengutip pembicaraan beberapa tokoh agama baik Islam atau Kristen untuk meyakinkan pembaca bahwa kerusuhan Ambon bukan pertikaian antar agama atau pemeluk agama berbeda. Tetapi kerusuhan tersebut dikatakan sebagai rekayasa pihak tertentu, tanpa memberikan petunjuk tentang tujuan perekayasa dan siapa pelaku rekayasa. Cara ini tampaknya dipilih *Kompas* untuk melokalisasi opini sebatas faktor keamanan, dan mencegah opini yang lebih luas tentang konflik antar kelompok yang berbeda agama. Cara-cara *Kompas* memberitakan tentang konflik mirip dengan cara-cara pemerintah menenangkan publik tentang suatu isu yang sensitif seperti melokalisasi situasi ke dalam satu kerangka berfikir, dalam hal ini keamanan, kemudian menenangkan publik dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah.

5.1.2.3 *Media Indonesia* menyoroti kasus Ambon dalam bahasa-bahasa yang menyentuh emosi (*mental process*) dan bernuansa militeristik. Secara eksplisit, *Media Indonesia* mengakui bahwa kasus Ambon sebagai kasus pertikaian antara kelompok Islam dan Kristen, bahkan melibatkan aparat keamanan sebagai pelaku dalam kerusuhan. Dalam konteks ini, *Media*

Indonesia menggunakan sudut pandang keamanan, namun terkesan menampilkan diri sebagai bagian lembaga keamanan itu sendiri. Kesan ini terlihat dalam pola pemberitaan yang menonjolkan peran aparat dan memberi pembelaan terhadap tindakan sekelompok aparat yang tidak semestinya dalam penanganan keamanan di Ambon (Maluku), sebagai tindakan sebagian atau oknum aparat yang tidak disiplin.

5.1.2.4 Dalam kasus Sambas dan Sampit, terlihat ketiga media massa tersebut memberikan sorotan dalam sudut pandang yang hampir serupa yakni dalam perspektif keamanan. Hal ini kemungkinan disebabkan isu yang melatarbelakangi konflik lebih bersifat budaya (bukan agama). *Republika* - dalam kasus Poso dan Maluku - sangat konsisten dengan tema posisi umat Islam dalam konteks politik dan kekuasaan, tetapi dalam kasus Sambas dan Sampit lebih menekankan sisi keamanan, yakni dengan menyebutnya sebagai kerusuhan antar suku yang berbeda. Namun *Republika* tetap berusaha menggiring opini untuk melihat kasus konflik antar suku ini dalam konteks nasional yakni sebagai anarkhi sosial yang dapat terjadi di wilayah manapun di Indonesia. Dengan cara ini *Republika* memperlihatkan bahwa ciri politik tidak dapat dilepaskan dari kelembagaan *Republika* sendiri.

5.1.2.5 *Kompas* melihat kasus Sambas dan Sampit sebagai kerusuhan antar warga pendatang dan asli, dalam perspektif keamanan. Dalam sorotan *Kompas* warga pendatang sebagai kelompok yang menyebabkan

memberikan gambaran bahwa konflik yang bernuansa agama (Islam vs non Islam) dapat terjadi secara lebih luas lagi sebagai agenda untuk membatasi akses politik dan ekonomi warga Islam.

5.1.2.8 *Kompas* menyajikan berita konflik Poso dengan perspektif keamanan. Konflik diberitakan sebagai kerusuhan antar warga yang menimbulkan kerugian material, fisik, dan jiwa. *Kompas* menghindari istilah-istilah yang memperlihatkan konflik Poso sebagai pertikaian antar warga yang berbeda identitas (SARA). Dengan memilih perspektif keamanan *Kompas* memperlihatkan sosok sebagai media yang tidak memihak salah satu kelompok, dan sekaligus sebagai media yang berusaha meredam perluasan konflik ke dalam konteks yang lebih luas yakni pertikaian yang melibatkan kelompok yang berbeda agama atau suku.

5.1.2.9 *Media Indonesia* memiliki kemiripan dengan *Kompas* dalam menyajikan berita konflik Poso, yakni dalam perspektif keamanan. Namun bedanya *Kompas* menempatkan sudut pandang keamanan sebagai upaya memperlihatkan kenetralan sikap, tetapi *Media Indonesia* menggunakan perspektif keamanan sebagai saluran bahasa aparat keamanan (rekayasa wacana). Berita yang disajikan *Media Indonesia* cenderung menggunakan gaya dialektika berupa paparan opini yang berkembang dalam masyarakat dan bantahan dari kalangan pejabat resmi dan aparat keamanan, yang berujung pada kesimpulan bahwa berita yang paling dapat dipercaya adalah bersumber dari aparat, atau pejabat resmi.

5.1.3 Dilihat dari cara dan perspektif ketiga media massa tersebut dalam merangkai berita, tampak orientasi yang berbeda dari masing-masing media massa. *Republika* secara eksplisit tampil sebagai media massa yang memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam hal politik, ekonomi, dan budaya. Jika berita yang disajikan tidak terkait secara langsung kepentingan umat Islam, *Republika* tetap tampil sebagai media massa yang bernuansa politik dengan menyoroti peran-peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum. *Kompas* melatarbelakangi pemberitaannya (kasus konflik) dengan perspektif "keamanan" dengan tujuan untuk menjadi penengah antara berbagai kelompok yang bertikai, sekaligus juga sebagai upaya membentuk citra sebagai media yang lebih mengutamakan kepentingan nasional, dengan cara meredam konflik melalui pemberitaan. *Media Indonesia* menampilkan berita konflik dengan perspektif "keamanan", sebagai bagian dari institusi keamanan. Dalam pemberitaan tentang konflik di Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso, *Media Indonesia* lebih terkesan dengan pemberitaan yang mengevaluasi dan melaporkan kinerja aparat keamanan dalam menangani konflik, dan membantah opini-opini yang berkembang dalam masyarakat dengan sumber berita dari aparat keamanan.

5.1.4 Dilihat dari penggunaan bahasa dan istilah untuk mendeskripsikan konflik terlihat kesamaan cara pandang ketiga media massa terhadap kelompok yang bertikai. Baik *Republika*, *Kompas* maupun *Media Indonesia* cenderung

terjadinya kerusuhan, sekaligus menjadi korban karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan warga setempat. Peran *Kompas* yang berusaha melihat kasus dalam sisi kesalahan dan akibat kesalahan dari salah satu kelompok yang bertikai menjadikan sosok media ini terkesan "paternalistik", sekaligus otoriter.

5.1.2.6 *Media Indonesia* melihat kasus Sambas dan Sampit sebagai pertikaian antar suku dengan sudut pandang keamanan. Dalam hal ini *Media Indonesia* melihat pertikaian ini sebagai ketidakmampuan warga pendatang menyesuaikan diri dengan warga tempatan. Namun sama halnya dengan pola pemberitaan terhadap kasus Poso dan Maluku, membaca laporan *Media Indonesia* tentang kasus ini, seolah membaca laporan dari aparat keamanan tentang situasi di daerah konflik.

5.1.2.7 Dalam kasus Poso, *Republika* melihat konflik dalam konteks politik, yakni persaingan antar elit untuk memperoleh kekuasaan. *Republika* melihat faktor identitas agama yang membedakan antar kelompok yang bertikai sebagai alat yang digunakan oleh kalangan elit untuk membentuk identitas dalam persaingan di tingkat elit. Dalam berita yang disampaikan *Republika* terlihat bahwa warga hanyalah kelompok yang dikorbankan, tidak tahu penyebab dan motif di balik kerusuhan. Meskipun *Republika* melihat konflik Poso sebagai rekayasa elit dan provokatornya, ada kecenderungan *Republika* mengaitkan peristiwa Poso dengan posisi umat Islam dalam konteks politik yang lebih luas. Kecenderungan ini

menggunakan bahasa yang memberi kesan warga yang bertikai adalah emosional, tidak berprikemanusiaan, sadis, tidak terdidik, dan mudah diprovokasi.

5.1.5 Berdasarkan berita konflik dari ketiga media massa tersebut, ada beberapa pokok isu konflik yang dominan dalam hubungan antar warga dalam masyarakat plural yakni: 1) konflik antara warga yang berbeda agama, Islam dan Kristen (kasus Ambon, dan Poso); 2) konflik yang bermuatan ideologis, mengarah kepada separatisme (kasus Ambon); 3) pertikaian antar preman dari kelompok yang berbeda agama (kasus Ambon, dan Poso); 4) persaingan politik di tingkat lokal antara kelompok yang berbeda agama (kasus Poso); 5) perluasan konflik antar warga karena aktifitas provokator (kasus Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso); 6) konflik bernuansa budaya terutama antara kelompok pendatang dengan kelompok yang telah lama menempati wilayah (asli) (kasus Ambon awal, serta Sambas dan Sampit).

5.1.5.1 Kesemua isu konflik di atas juga tampak dalam analisis para pengamat (peneliti, praktisi, dan LSM). Kalangan peneliti/akademisi cenderung melihat isu tersebut sebagai klimaks dari persoalan yang lebih dalam dengan latar belakang kesenjangan sosial ekonomi, kepentingan ekonomi kelompok tertentu, kebijakan pembangunan yang sentralistik, kekecewaan terhadap penegakan hukum, dan keterasingan budaya serta solidaritas kelompok. Sementara kalangan LSM (asing) melihat kasus konflik – terutama yang bernuansa agama – sebagai penindasan HAM

oleh kelompok Islam terhadap non Islam. Berbeda dengan kalangan LSM lokal yang melihat kesemua isu utama tersebut sebagai penampakan konflik yang sesungguhnya berakar pada perasaan kekecewaan terhadap hukum, kebijakan ekonomi, persaingan elit lokal, praktek korupsi, dan diperparah dengan kesenjangan ekonomi, serta adanya warisan sejarah kolonial dalam pemisahan penduduk berdasarkan agama (kasus Ambon).

- 5.1.5.2 Berdasarkan tinjauan media massa dan kalangan pengamat bentuk konflik di ketiga daerah yang diteliti – Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso – ada kemiripan di samping perbedaan. Kemiripan terutama terlihat dari awal pemicu konflik yang berawal dari persoalan sederhana, kemudian meluas menjadi pertikaian kelompok, dan dipertajam oleh aksi provokasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diketahui tetapi mengambil identitas kelompok yang memang sudah bertikai. Aksi provokasi tersebut berupa penyebaran isu, tindakan premanisme yang dilakukan salah satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda, hingga sampai ke pembunuhan salah satu warga yang dilakukan (seolah-olah) oleh kelompok yang menjadi lawan. Namun dalam pandangan para peneliti, warga mudah terprovokasi karena sudah lama tersimpan kecurigaan antar kelompok disebabkan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang bertikai. Kemiripan lain terlihat juga dalam pola keterlibatan warga dalam konflik sebagai wujud solidaritas sosial disebabkan ikatan emosional yang kuat dalam kelompok.

5.1.5.3 Adapun perbedaan karakteristik konflik di ketiga tempat ini terletak dalam peran elit yang memanfaatkan identitas yang berbeda antar warga. Misalnya di Ambon, adanya kesenjangan ekonomi antara pendatang dan warga tempatan yang disertai perbedaan identitas berdasarkan agama sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu kelompok yang selama ini mendapat perlakuan istimewa oleh pemerintah. Persaingan ini meningkat menjadi persaingan antara kelompok yang berbeda agama, kemudian diangkat menjadi isu nasional dan internasional oleh pihak yang ingin mengabadikan pemisahan antar warga yang berbeda agama. Dalam kasus Sambas dan Sampit konflik dicirikan dengan pertikaian antara suku Madura (pendatang) dengan suku tempatan (Melayu, Dayak, dan Cina). Selain itu pertikaian dipertajam dengan adanya kebijakan pembangunan nasional yang memarginalkan penduduk asli. Namun kemudian konflik tersebut juga melibatkan elit lokal yang melakukan "perjuangan" memperkuat identitas kesukuan dari penduduk asli melalui organisasi politik. Terakhir, di Poso provokator (elit kekuasaan) memperpanjang konflik dengan memanfaatkan isu antar agama, guna mencapai tujuan yang menyangkut persoalan ekonomi dan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang.

5.1.6 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa solidaritas sosial dan primordial, baik didasarkan etnik atau agama sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Ini terbukti dari mudahnya provokator menggerakkan massa untuk

melakukan tindak kekerasan melalui isu yang menyentuh kepentingan atau mungkin harga diri kelompok. Sementara di sisi lain, hubungan antar komunitas yang berbeda identitas tidak seintensif hubungan dalam komunitas, terutama untuk kalangan masyarakat di lapisan akar rumput. Selain itu, daya kritis masyarakat untuk memahami suatu peristiwa lebih rendah dibanding keterlibatan emosional dengan kelompok sehingga apabila ada isu negatif lebih cepat diserap dengan sikap defensif ketimbang sikap kritis dan pikiran terbuka. Kondisi ini menjadi karakteristik keragaman masyarakat Indonesia. Karena itu, pendidikan multikultural dibutuhkan adalah pendidikan yang mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat.

- 5.1.7 Berdasarkan analisis terhadap cara-cara media massa menyajikan konflik dan kebutuhan masyarakat majemuk yang demokratis terhadap peran media massa yang ideal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, media massa lebih cenderung menampilkan berita untuk kepentingan citra perusahaannya (ideologi). *Republika* cenderung dengan warna politik yang berorientasi kepentingan kelompok (Islam), *Kompas* lebih suka memilih menjadi media yang terkesan "netral" seperti layaknya kemauan pemerintah, sedangkan *Media Indonesia* tampak lebih menonjolkan peran aparat keamanan. Kedua, sejalan dengan ideologi di balik penyusunan berita tentang konflik, masing-masing media massa memiliki sumber rujukan yang mendukung kemauan redaktur. Misalnya *Republika* banyak mengambil rujukan dari tokoh-tokoh Islam, diperkuat juga oleh pejabat resmi, dan



aparatus keamanan; *Kompas* lebih cenderung dengan rujukan pejabat dan aparat keamanan; *Media Indonesia* merujuk pendapat kalangan aparat sebagai penyimpul dari rujukan-rujukan lain dari berbagai kalangan. Implikasi dari perbedaan rujukan utama ini tampak dalam penggunaan bahasa dan cara penyusunan tema pemberitaan. Ketiga, oleh karena ketiga media massa ini masih berpihak kepada kepentingan ideologi sendiri, maka peran media massa belum memadai untuk menjadi sarana publik (*public spheres*) dalam menciptakan masyarakat multikultural yang demokratis. Dan keempat, dari sisi pendidikan multikultural, media massa perlu dijadikan sumber belajar yang dikaji secara kritis. Jika tidak dikaji secara kritis, maka masyarakat (siswa) kehilangan manfaat yang berarti dalam pembentukan sikap multikultural yang semestinya dapat diperoleh melalui media massa.

5.1.8 Bertolak dari karakteristik konflik yang disimpulkan dari pemberitaan media massa dan tinjauan para pengamat, maka perlu disusun satu rekomendasi teoritis pendidikan multikultural yang diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan pendidikan multikultural. Rekomendasi teoritis ini meliputi rasional perlunya pendidikan multikultural, landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis.

5.1.8.1 Pendidikan multikultural merupakan keharusan yang mutlak ada dalam konteks sosial politik dan ekonomi bangsa Indonesia saat ini baik dalam tataran nasional maupun global.

- 5.1.8.2 Landasan filosofis pendidikan multikultural yang direkomendasikan dari kajian ini adalah pendidikan multikultural dalam perspektif transformatif yang berakar pada filsafat rekonstruksi sosial (*social reconstructionist*), yakni pendidikan sebagai proses melakukan transformasi-diri dan tranformasi-sosial untuk menciptakan masyarakat multikultural yang lebih demokratis, adil, dan inklusif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5.1.8.3 Landasan psikologis pendidikan multikultural transformatif adalah Psikologi Sosiohistoris-Kultural dari Vygotsky dan Brunner. Landasan ini menempatkan proses belajar sebagai proses dialektika secara timbal balik antara tataran sosial dan tataran personal.. Selain itu, belajar adalah proses partisipatif dalam interaksi budaya untuk mengkonstruksi *meaning* dalam hubungan denga diri, lingkungan dan orang lain.
- 5.1.8.4 Landasan pedagogis pendidikan multikultural transformatif berangkat dari gagasan pendidikan kritis yang menekankan proses transformasi-diri dan transformasi-sosial untuk menciptakan masyarakat multikultural yang lebih demokratis, adil, inklusif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Multikultural Transformatif dikembangkan dari tiga konsepsi dasar yaitu konsepsi diri, konsepsi budaya, dan konsepsi bernegara yang semuanya berakar pada Dasar Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi ini dikembangkan lagi menjadi nilai inti (*core values*) yang menjadi patokan pengembangan tujuan, kompetensi,

proses, materi, dan evaluasi dalam pendidikan multikultural. Nilai-nilai inti tersebut adalah: ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap negara kesatuan, penghargaan dan penerimaan terhadap keragaman budaya, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menghormati martabat manusia dan hak azasi manusia.

5.2 KESIMPULAN

- 5.2.1 Secara umum disimpulkan dari kasus Ambon, Sambas dan Sampit , dan Poso, bahwa persoalan antar etnik terjadi dalam dua bentuk yaitu, pertikaian antar warga yang berbeda agama, dan pertikaian antar suku yang berbeda. Pertikaian dalam kedua bentuk itu diawali dengan pertikaian kecil antara beberapa warga, lalu berkembang menjadi pertikaian yang menggunakan identitas agama atau suku. Kemudian pertikaian menjadi luas dan berlarut-larut, karena dikembangkan oleh kelompok-kelompok kecil yang mengambil keuntungan dari pertikaian antar warga. Fenomena perkembangan konflik tersebut dapat dikerangkakan dalam tataran teoritis ke dalam cakupan teori *social mechanism* dan *primordial affiliation* di satu sisi, serta teori *elite competition* dan *ethnic entrepreneur* di sisi lain.
- 5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adanya jaminan kesetaraan dan kesatuan antar anggota masyarakat dalam dasar filsafat dan konstitusi negara, belum secara otomatis dapat menekan potensi konflik dalam masyarakat Indonesia, atau menciptakan masyarakat multikultural

yang demokratis, adil, dan inklusif. Untuk itu, diperlukan satu sistem pendidikan multikultural yang diharapkan dapat menciptakan anggota masyarakat yang memiliki "kecerdasan dan kesalehan multikultural", serta mampu berpartisipasi menciptakan masyarakat multikultural yang demokratis, adil, dan inklusif. Pendidikan ini didasarkan pada nilai-nilai falsafah bangsa dan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5.2.3 Berdasarkan kajian penelitian ini disimpulkan bahwa Pendidikan Multikultural Transformatif, merupakan pendidikan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan masyarakat multikultural saat ini dan masa datang. Dalam penelitian ini, Pendidikan Multikultural Transformatif tersebut dirumuskan dalam bentuk kerangka konseptual yang meliputi landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis.

5.3 SARAN-SARAN

- 5.3.1 Kerangka Pendidikan Multikultural Transformatif yang dikembangkan dalam disertasi ini berupa kerangka hipotetik yang didasarkan atas karakteristik konflik antar etnik di Indonesia. Diperlukan penelitian lanjut untuk mengembangkan kerangka hipotetik ini sehingga bersifat operasional, sehingga menjadi sebuah model pendidikan multikultural yang sistematis.
- 5.3.2 Proses pembelajaran dalam Kerangka Pendidikan Multikultural Transformatif dikembangkan dengan pendekatan multidisiplin. Karena itu diharapkan guru dan juga Lembaga Pendidikan Keguruan dapat mengembangkan kompetensi

keguruan yang bersifat multidisiplin untuk melengkapi kemampuan guru menghadapi tantangan dalam pengajaran yang bersifat multikultural.

5.3.3 Media massa dapat berperan sebagai sumber belajar dan juga sumber informasi bagi siswa. Namun untuk itu diperlukan pendekatan kritis karena realita yang disampaikan oleh media massa telah dikonstruksi sesuai dengan ideologi, kepentingan, dan tujuan yang ditetapkan oleh pemilik media massa. Untuk ini disarankan hal-hal sebagai berikut.

5.3.3.1 Kepada Guru Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, agar melengkapi pendekatan belajar mengajar dengan perspektif kritis. Perspektif kritis memberikan kesempatan kepada siswa bersama-sama dengan guru untuk mengkaji realita yang disajikan oleh media massa, dengan tetap mewaspadaai kesimpulan-kesimpulan yang bias karena kepentingan ideologi, dan tujuan institusional yang berada di belakang pemberitaan media massa tersebut.

5.3.3.2 Kepada pengelola media massa, agar bersama-sama dengan dunia pendidikan mengembangkan perspektif multikultural yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis. Media massa perlu menyadari bahwa profesionalisme jurnalistik tidak hanya berlandaskan pada kepentingan pasar, tetapi dikembangkan juga dalam kerangka berfikir terwujudnya ruang publik yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan kemajemukan dalam masyarakat.

- 5.3.4 Lembaga Pendidikan Keguruan sudah saatnya memasukan pendidikan multikultural sebagai bagian kurikulum. Kurikulum pendidikan multikultural hendaknya dilengkapi dengan perspektif, pendekatan, dan materi yang dikembangkan secara jelas, terencana dan sistematis.
- 5.3.5 Dalam tingkat tertentu program transmigrasi masih diperlukan terutama untuk daerah yang masih jarang penduduknya, dan sumber daya alam yang potensial. Namun disarankan kepada pihak pemerintah sebagai penanggungjawab program perlu memperhatikan aspek-aspek budaya sehingga tidak terjadi perbenturan budaya antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Salah satu kemungkinan program pemahaman antar budaya bisa dilakukan melalui penyuluhan oleh kelompok-kelompok belajar masyarakat yang ditunjuk sebagai pelaksana.